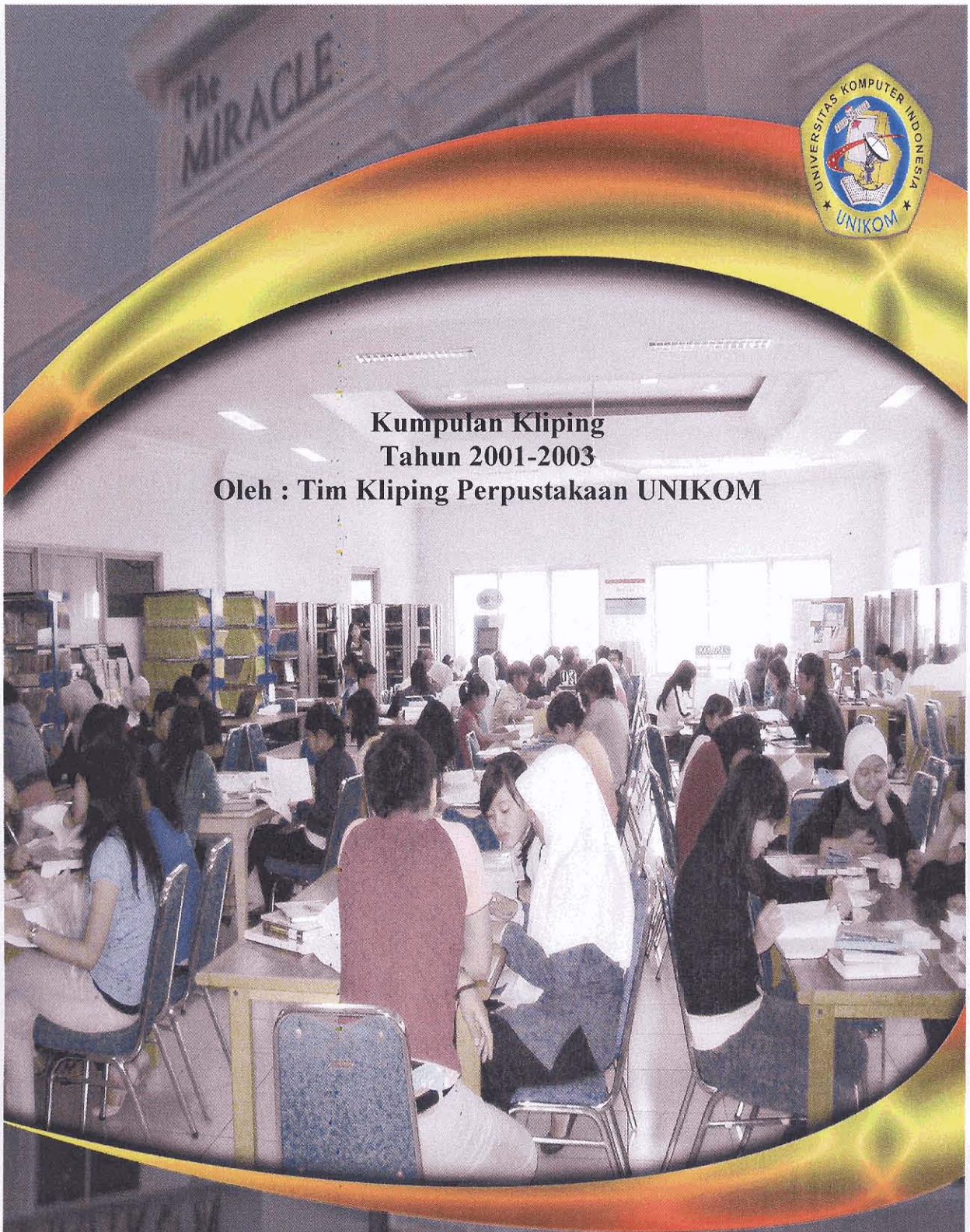



**Kumpulan Kliping**
**Tahun 2001-2003**
**Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM**

# perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 29 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 35 / 1 - 5
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : WIJAYA, krisna
Subjek : ( MO. KLASS : FREDI / 332.7

## RUU Perkreditan

# Keseimbangan dalam Keberpihakan

SALAH satu reaksi terhadap masa lalu adalah dalam hal praktik perkreditan yang banyak dinilai telah memberikan banyak andil atas terpuruknya perekonomian Indonesia.

Oleh sebab sangat wajar kalau pada akhirnya pemerintah mempunyai inisiatif untuk mengajukan Rancangan Undang Undang Perkreditan (RUUP) kepada DPR.

Adanya RUUP tentunya bukan jawaban atas ketidakpunyaan UU sehingga harus diadakan. Lebih dari itu esensi lahirnya RUUP yang nantinya akan menjadi Undang-Undang Perkreditan (UUP) sangat pasti ditujukan sebagai suatu acuan baku yang dapat memberikan jaminan kepastian dalam melaksanakan perkreditan.

Hal tersebut nampak jelas dalam Pasal 3 RUUP mengenai asas dan tujuan yang mendasarkan asas perkreditan kepada kepercayaan, keadilan, kejujuran, transparansi, kepatutan, kebiasaan kesusilaan dan sesuai dengan kepastian hukum.

Atas asas dan tujuan itulah maka tujuan umum adanya UUP sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 RUUP adalah meliputi;

(a) Memberikan keseimbangan atas hak dan kewajiban kepada kreditor dan debitor.

(b) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

(c) Transparansi.

(d) menjamin terlaksananya pelaksanaan perkreditan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Terlepas siapa yang menjadi konseptornya, tampak secara jelas bahwa RUUP memberikan nuansa keberpihakan yang lebih tegas terhadap usaha kecil di Indonesia.

Dari 80 Pasal dalam RUUP tercatat delapan pasal yang secara signifikan yang menunjukkan keberpihakan kepada usaha kecil (**Tabel 1**).

Ini jelas lahir dari semangat reformasi yang berpijak kepada masa lalu di mana dikesankan seolah-olah perbankan nasional tidak mempunyai keberpihakan secara nyata kepada usaha kecil.

Di saat krisis ternyata banyak bukti bahwa kredit macet banyak disebabkan oleh para konglomerat bukannya pengusaha kecil.

Selain keberpihakan kepada usaha kecil, RUUP juga memberikan harapan baru terhadap terciptanya rasa keadilan terhadap pihak-pihak yang dirugikan.

Hal ini dicerminkan dalam berbagai Pasal yang menyangkut pemberian sanksi baik bagi kreditor maupun debitor (**Tabel 2 dan 3**).

Dari pasal-pasal yang dikategorikan sebagai sanksi tnampak jelas bahwa referensinya adalah praktik-praktik perbankan khususnya di bidang perkreditan di masa lalu. Sebagaimana banyak diungkap dalam berbagai kajian ada kesan bahwa praktik perkreditan di masa lalu banyak diselewengkan oleh oknum-oknum manajemen dan atau pemilik.

Pemberian kredit hanya kepada grup, pelanggaran batas maksimal pemberian kredit (BMPK) dan rekayasa adalah contoh-contoh nyata yang pelanggaran para oknum bankir di masa lalu.

Sekalipun masih berupa RUUP tampaknya rancangan tersebut belum banyak menerima masukan dari kalangan praktisi perbankan khususnya apabila dikaitkan dengan praktik operasional perbankan yang lazim (*best practice*) diberlakukan secara universal.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya restrukturisasi perbankan nasional, maka kepada semua bank peserta rekapitalisasi diwajibkan mengikuti acuan baku berdasarkan praktik-praktik perbankan yang telah teruji secara internasional (**lihat boks**).

Dengan memperhatikan isi RUUP dan acuan pengelolaan perbankan nasional pada pasca rekapitalisasi sangat jelas bahwa sosok perbankan nasional nanti akan sangat sarat dengan berbagai peraturan dan ketentuan.

Dari sisi lain hal tersebut memberikan dampak positif karena bank akan sangat konservatif sehingga akan bertumbuh menjadi bank yang sehat.

Ini sejalan dengan berlakunya kaidah *trade off* pada bisnis perbankan di mana semakin ketat sistem dan prosedur (*services*) akan semakin rendah tingkat risikonya (*risk*).

RUUP jelas akan menstimulir kalangan perbankan menjadi ekstra hati-hati karena kedudukan UU lebih tinggi dari pada peraturan maupun ketentuan bank yang dikeluarkan oleh pihak Bank Indonesia maupun masing-masing bank.

Karena desain sistem dan prosedurnya yang cenderung ketat, maka pelayanan dalam kredit akan sangat ketat dan prosedural. Hal ini jelas tidak bias dihindari karena perbankan harus memperhatikan UUP dan acuan pengelolaan perbankan yang berlaku.

Oleh sebab itu, haruslah dimaklumi sejak awal kalau pada akhirnya "kemudahan" memperoleh fasilitas kredit tidak akan dijumpai.

Memang menjadi agak kontradiksi dengan beberapa pasal RUUP yang menunjukkan keberpihakan kepada usaha kecil. Karena sangat sulit bagi bank dapat memberikan "kemudahan" kepada usaha kecil karena banyaknya keterikatan perbankan kepada berbagai peraturan dan ketentuan termasuk UUP.

Mengingat statusnya masih berupa RUUP, maka tidak ada salahnya kalau pemerintah mulai mensosialisasikan RUUP tersebut baik kepada kalangan pengusaha, perbankan, maupun akademisi.

Ada hal prinsip yang perlu direnungkan kembali atas latar belakang lahirnya RUUP.

Pertanyaannya adalah apakah memang kelemahan pengelolaan perkreditan itu disebabkan oleh unsur peraturannya (*engine error*) atau karena unsur manusianya (*human error*)?

Ada kesan bahwa pengelolaan perkreditan di masa lalu lebih banyak disebabkan oleh aspek hukumnya yang tidak memadai. Kesan seperti itu belum tentu benar karena kenyataan menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi justru karena unsur manusianya apakah itu oknum pengusahanya maupun oknum bankirnya.

Sebenarnya piranti hukum

yang ada masih memadai dalam arti kalau diberlakukan secara benar, yaitu dilaksanakan secara jujur, adil dan terbuka, maka praktik-praktik yang tidak terpuji dapat diredam.

Kalau harus ada penyempurnaan di sana-sini, permasalahannya justru yang kurang serius ditangani adalah *law enforcement* oleh para penegak hukum.

Jadi jangan sampai RUUP itu pada saat diberlakukan nanti menimbulkan distorsi karena yang gatal kepalanya tetapi yang digaruk tangan. Kalau itu terjadi sungguh maka keberadaan UUP akan menjadi tidak efisien apalagi efektif.

**(Krisna Wijaya,** *praktisi dan pengamat perbankan dan bekerja pada sebuah bank pemerintah di Jakarta***).**

TABEL 1
**RUU PERKREDITAN DAN USAHA KECIL**

| No | Pasal | Ringkasan Isi |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Kewajiban kreditor memberikan perhatian kepada usaha kecil. |
| 2 | 10 | Kewajiban kreditor memberikan prioritas utama dalam pemberian kredit kepada usaha kecil. |
| 3 | 15 | Kewajiban kreditor untuk menyediakan dana kredit dalam waktu secepat mungkin bagi kredit usaha kecil. |
| 4 | 27 | Pengecualian pembuatan perjanjian kredit dihadapan Notaris bagi usaha kecil. |
| 5 | 28 | Setiap kreditor wajib menyisihkan minimal 40% dari total kredit untuk kepentingan usaha kecil. |
| 6 | 29 | Jaminan kredit bagi usaha kecil adalah kegiatan usaha dan/atau prospek usaha. |
| 7 | 30 | Perjanjian kredit untuk pengusaha kecil dibuat sederhana dan tidak merugikan kepentingan pengusaha kecil. |
| 8 | 31 | Kreditor wajib melakukan pengawasan dan bimbingan kepada debitor usaha kecil. |

TABEL 2
**RUU PERKREDITAN DAN SANGSI KEPADA KREDITUR**

| No | Pasal | Ringkasan Isi |
|---|---|---|
| 1 | 68 | Kreditor yang melakukan kapitalisasi perhitungan bunga atas tunggakan bunga kredit lebih dari 3 bulan diharuskan mengembalikannya dengan disertai denda sebesar 10 persen per bulan dari bunga yang sudah dikapitalisasi. |
| 2 | 71 | Komisaris, direksi dan pegawai kreditor yang menghilangkan jaminan kredit diancam pidana minimal 3 tahun-maksimal 15 tahun penjara dan minimal Rp 3 milyar. |
| 3 | 72 | Komisaris, direksi dan pegawai kreditor yang dengan sengaja meminta imbalan diancam pidana sekurang-kurangnya 5 tahun-maksimal 15 tahun penjara dan denda minimal Rp 5 milyar. |
| 4 | 73 | Komisaris, direksi dan pegawai kreditor yang melakukan penatausahaan palsu yang berkaitann dengan permohonan kredit dari debitor diancam pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara dan denda minimal Rp 3 milyar. |
| 5 | 74 | Komisaris, direksi dan pegawai kreditor yang tidak mengembalikan kelebihan hasil penjualan jaminan diancam pidana minimal 3 tahun-maksimal 15 tahun penjara dan denda minimal Rp 3 milyar. |

TABEL 3

**RUU PERKREDITAN DAN SANGSI KEPADA DEBITUR**

| No | Pasal | Isi |
|---|---|---|
| 1 | 75 | Sanksi kepada debitor apabila secara sengaja mengalihkan, merusak, menghilangkan jaminan dan dokumen lainnya diancam pidana minimal 3 tahun-maksimal 15 tahun penjara dan denda minimal Rp 3 milyar. |
| 2 | 76 | Sanksi kepada debitor apabila secara sengaja memberikan keterangan, dokumen dan data yang tidak benar atau dipalsukan diancam pidana minimal 3 tahun-maksimal 15 tahun penjara dan denda minimal Rp 3 milyar. |
| 3 | 77 | Sanksi kepada debitor apabila menggunakan kredit yang tidak sesuai dengan peruntukkannya diancam pidana minimal 5 tahun-maksimal 15 tahun penjara dan denda minimal Rp 5 milyar. |

Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hari /Bulan/ Tahun : RABU / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 13 / 5-7
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~
Penulis : -
Judul Artikel/ Berita : KREDIT Perbankan Berpotensi Jadi Bermasalah
SUBJEK / NO. KLASS : KREDIT 1332.7

# Kredit Perbankan Berpotensi Jadi Bermasalah

**Jakarta, Kompas**

Kenaikan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) di atas 17 persen dan nilai tukar rupiah di atas level Rp 12.000 per dollar AS berpotensi memunculkan terjadinya problem kredit macet gelombang kedua dalam volume besar.

Bahkan, jika dalam tiga bulan mendatang suku bunga dan nilai tukar rupiah tidak juga membaik, kondisi perbankan bukan hanya menghadapi problem kredit bermasalah (*non-performing loan*/NPL), tetapi juga akan mengalami *negative spread* (pendapatan bunga lebih kecil dari biaya bunga).

Hal ini khususnya dialami oleh bank-bank yang mendapatkan bunga obligasi tetap dalam rangka rekapitalisasi bank. Kondisi *negative spread* lebih parah lagi akan dialami oleh bank-bank yang struktur dananya didominasi oleh deposito berjangka. *Negative spread* ini pada akhirnya akan memakan modal bank-bank itu.

Demikian kajian Biro Riset InfoBank (BRI) yang dipublikasikan Mei dan ringkasannya diterima *Kompas*, Selasa (8/5). Penanggung jawab BRI Eko B Supriyanto memperkirakan, saat ini masih ada 55 bank yang posisi NPL-nya (neto) masih di atas lima persen. Kondisi perbankan yang mengidap penyakit kredit macet gelombang kedua ini dicerminkan antara lain oleh kebijakan Bank Indonesia (BI) yang memperlunak keharusan dicapainya target NPL maksimum lima persen pada akhir 2001.

Selain itu, ada 18 bank yang rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*/CAR)-nya masih di bawah delapan persen. Jumlah bank dengan CAR di bawah delapan persen akhir 2001 bisa mencapai lebih dari 20 bank, jika kondisi makro tidak membaik. NPL dan *negative spread* merupakan dua faktor paling potensial yang bisa mempengaruhi CAR tahun 2001.

Diungkapkan, kondisi saat ini berpotensi semakin buruk, karena posisi aset perbankan masih lebih banyak didominasi oleh obligasi atau surat berharga. Rinciannya adalah, kredit Rp 269 trilyun (di luar yang direstrukturisasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN), SBI Rp 59 trilyun, dan obligasi pemerintah Rp 430 trilyun.

Dari obligasi pemerintah Rp 430 trilyun, sejumlah Rp 228 trilyun (53 persen) memiliki suku bunga variabel (*variable rate*), Rp 168 trilyun (39 persen) *fixed rate*, dan Rp 34 trilyun (8 persen) berupa *hedged bond* (obligasi yang dilindungnilaikan).

Jika dimasukkan kredit yang direstrukturisasi di BPPN atau kredit macet gelombang pertama yang besarnya Rp 280 trilyun, posisi perkreditan perbankan masih didominasi oleh kredit dalam restrukturisasi. Kondisi seperti ini akan semakin memberatkan posisi perkreditan perbankan.

Kredit bermasalah gelombang kedua itu sendiri diperkirakan mencapai Rp 65 trilyun. Ditambah dengan kredit bermasalah, termasuk yang di BPPN, kredit bermasalah di perbankan akan mencapai Rp 345 trilyun.

Dengan posisi rasio kredit terhadap deposito (*loan to deposit ratio*/LDR) di bawah 35 persen, perbankan dalam posisi sangat rawan, karena di satu sisi masih mengidap penyakit disintermediasi, sementara di sisi lain mengalami tekanan *negative spread* dan NPL.

## Delapan pendekatan

Lebih jauh diungkapkan, ada delapan langkah yang bisa ditempuh bank untuk mencegah kondisi menjadi lebih parah. Pertama, bagi bank-bank rekap, segera melakukan *swap* (pertukaran) antara obligasi dengan kredit yang sudah direstrukturisasi dan kredit yang belum direstrukturisasi. Namun, pola ini mengandung risiko penurunan CAR, sehingga lebih disarankan pada bank-bank dengan CAR di atas 20 persen.

Kedua, BI tidak membuat kebijakan moneter terlalu ketat. Ketiga, BI segera mengubah ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM). Misalnya, kelebihan GWM diberi bunga agar bank-bank sedikit tertolong. Keempat, bank-bank harus melepas kredit ke sektor-sektor yang diyakini tahan krisis, seperti usaha kecil-menengah dari sektor perdagangan dan konsumsi.

Kelima, bank-bank segera mengubah struktur dana dari yang bergantung pada pendanaan deposito berjangka, ke giro dan tabungan, dalam upaya menekan *cost of fund*. Keenam, memupuk *customer based* yang lebih solid, sehingga mempunyai kepastian dana dengan harga relatif murah. Ketujuh, menggalakkan *fee-based income*. Kedelapan, melakukan tukar-menukar obligasi *fixed rate* dengan obligasi *variable rate* antarbank rekap. **(tat)**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 31 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 13 / 6-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : BURSA I 332 b
IND. KLASS

# Sentimen Konsumen Semakin Memburuk

**Jakarta, Kompas**

**Harapan konsumen terhadap "situasi ekonomi sekarang" semakin memburuk. Itu terlihat dari semakin menurunnya indeks ekspektasi (IE) yang kini mencapai titik terendah sejak dua tahun terakhir ini. Konsumen khawatir kondisi politik dan keamanan semakin memperburuk ekonomi yang tercermin dari tingkat inflasi serta depresiasi rupiah yang menggerogoti prospek keuangan keluarga.**

Demikian kesimpulan penelitian Danareksa Research Institute (DRI) mengenai Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) yang dipengaruhi dari Indeks Situasi Sekarang (ISS) dan IE yang dipublikasikan, Rabu (30/5), di Jakarta.

Hasil survei di bulan April untuk edisi Mei ini menunjukkan, IKK untuk ketiga kalinya sejak Januari 2001 kembali melemah, jatuh dari posisi 98,5 menjadi 97,9. Jatuhnya IKK disebabkan karena menurunnya ISS maupun IE. ISS turun dari 80,3 menjadi 79,7 karena memburuknya kondisi ekonomi, sedangkan IE turun dari 115,5 menjadi 112,2 karena para konsumen merasa ragu atas prospek keuangan keluarga mereka dan memburuknya prospek ekonomi.

Menurut analis DRI, Steve Susanto dan David Sumual, perubahan kondisi saat sekarang yang paling signifikan adalah penurunan sentimen konsumen sebesar 7,2 persen atas "situsasi sekarang". Hal ini disebabkan karena konsumen ketakutan atas semakin cepatnya tingkat inflasi dan depresiasi rupiah, serta masalah politik yang semakin memburuk (**lihat gambar**).

Selain itu, penurunan rupiah yang cepat memicu kekhawatiran akan inflasi, yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup serta memicu kekhawatiran akan semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

## Kekerasan

Di sisi politik, konsumen paling takut akan kekerasan. Dan, ketakutan atas kekerasan ini semakin mengikis kepercayaan mereka atas kemungkinan ekonomi Indonesia keluar dari krisis. Kekhawatiran atas kemungkinan bentrokan antara pengikut Presiden Abdurrahman Wahid dan pengikut lawan politik Presiden.

Oleh karena sentimen konsumen terus saja dibayangi oleh kekhawatiran tindak kekerasan, maka mereka melihat bahwa memburuknya prospek ekonomi akan mengganggu pendapatan mereka dalam enam bulan mendatang. Hal ini ditunjukkan oleh turunnya "indeks ekspektasi pendapatan keluarga" pada posisi yang terendah dalam dua tahun terakhir ini.

Selain itu, karena rupiah jatuh di bawah Rp 12.000, terendah dalam 31 bulan terakhir, hampir semua konsumen memprediksi kenaikan tingkat harga akan memperlemah daya beli mereka. Akibatnya, konsumen mengurangi belanja mereka, di mana jumlah konsumen yang mempunyai rencana membeli barang tahan lama (*durables*) turun dari 29,5 persen menjadi 26,5 persen.

Walaupun pertumbuhan ekonomi tidak mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal pertama tahun ini, tetapi keadaan sentimen konsumen sangat buruk. Itu disebabkan karena perkembangan keadaan politik yang membuat ketidakstabilan di Indonesia. Dalam keadaan ketidakstabilan kondisi sosial seperti ini, sentimen konsumen semakin tertekan karena kemungkinan timbulnya tindak kekerasan menyusul sidang DPR.

Akibatnya, perekonomian telah tumbuh di atas ekspektasi di kwartal pertama, bisa jadi akan melambat bilamana kepercayaan konsumen terus saja memburuk di bulan-bulan mendatang. Dengan adanya penurunan kepercayaan konsumen atas perekonomian ini, konsumen akan mengurangi belanja mereka. Selain itu, adanya kenaikan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) malah akan mendorong pengurangan belanja barang tersebut menjadi kenyataan.

Survei kepercayaan konsumen DRI ini menggunakan sampel sekurangnya 1.700 rumah tangga di enam wilayah, bekerja sama dengan AC Nielsen. Kepercayaan konsumen dirancang untuk mengukur niat konsumen dalam belanja. Kepercayaan konsumen juga dirancang untuk melihat efek dari kejadian yang mungkin mempengaruhi pola belanja. **(dis)**

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN KONSUMEN**




Sumber: Danareksa Research Institute

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 3 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 14 / 1-4
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / NO. KLASS : INFLASI / 332.41

# Angka Inflasi Mulai Mengkhawatirkan

**Jakarta, Kompas**

Laju inflasi pada empat bulan pertama di tahun 2001 dinilai sebagai mengkhawatirkan, dibandingkan dengan angka inflasi periode serupa tahun 2000 lalu. Meningkatnya inflasi pada empat bulan pertama tahun ini, terutama disebabkan kurs rupiah yang terus melemah terhadap dollar AS yang mengakibatkan terjadi inflasi impor dan tingkat suku bunga yang semakin tinggi.

"Inflasi dalam dua bulan terakhir ini juga sudah mengkhawatirkan. Inflasi dengan perbandingan antara tahun ke tahun (*year on year*), misalnya antara April 2001 dan April 2000 sudah mencapai 10,51 persen," ujar Deputi Kepala Badan Pusat Statistik Bidang Statistik, Distribusi dan Neraca Nasional, Kusmadi Saleh, saat memberikan penjelasan mengenai inflasi dan ekspor-impor di Jakarta, Rabu (2/5).

Dia menambahkan, inflasi hingga Maret 2001 sejak Maret 2000 sudah tercatat sebesar 10,6 persen. Angka inflasi Februari 2001 sejak Februari 2000 sebesar 9,1 persen. Inflasi Januari 2001 sejak Januari 2000 sebesar 8,3 persen.

Kusmadi tidak dapat memperkirakan bagaimana pola inflasi tahun ini. Namun menurut dia, perkiraan inflasi di atas 10 persen pada tahun ini, adalah merupakan skenario terburuk, dan bisa terjadi jika tahun 2001 ini kemungkinan mengulang pola inflasi tahun 2000.

Pada tahun 2000 lalu, di bulan-bulan awal, inflasi tergolong rendah, sedangkan pada bulan-bulan berikutnya menjadi semakin tinggi.

"Meningkatnya laju inflasi *year on year* itu, sebaiknya diperhatikan dan menjadi pertimbangan para pebisnis. Kita sangat risau dengan inflasi *year on year* ini," tambah Kusmadi.

Selama empat bulan pertama tahun 2001 ini, kurs rupiah telah terdepresiasi sekitar 17 persen terhadap dollar AS dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2000.

Pada pasar "spot" antar-bank Jakarta, pada perdagangan kemarin, rupiah ditutup menguat tipis sebesar 22 poin menjadi Rp 11.138/Rp 11.238 per dollar AS.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik, angka inflasi pada bulan April 2001 adalah sebesar 0,46 persen. Dengan demikian, laju inflasi tahun kalender Januari 2001 hingga April 2001 menjadi 2,57 persen.

Inflasi tertinggi terjadi di Sampit sebesar 3,38 persen, terendah di Kendari sebesar 0,02 persen.

Deflasi (kebalikan dari inflasi atau kemerosotan harga-harga) terbesar terjadi di Banda Aceh sebesar minus 1,39 persen dan terkecil di Kendari sebesar minus 0,01 persen.

Dari tujuh kelompok pengeluaran konsumsi—yang tercakup dalam indeks harga konsumen—hanya kelompok bahan makanan yang mengalami deflasi sebesar minus 0,99 persen.

Enam kelompok lainnya mengalami inflasi yaitu kelompok makanan jadi, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, kelompok transpor, dan kelompok komunikasi.

Penyebab inflasi terbesar pada bulan April 2001 lalu, adalah akibat kenaikan harga emas perhiasan. "Harga emas itu kan mengikuti kurs rupiah terhadap dollar AS. Jika kurs rupiah terhadap dollar meningkat, harga emas juga meningkat," ujar Kusmadi.

Pada April lalu, nilai tukar rupiah sempat terpuruk hingga mencapai Rp 12.450 per dollar AS.

Selain meningkatnya harga emas perhiasan, harga cabe merah, minyak goreng, sampo, tarif air minum, televisi, dan ayam ras, juga turut mempengaruhi inflasi. Namun, ada beberapa jenis barang yang turun harganya seperti beras, ikan segar, cabe rawit, tomat, sayur, bawang merah, telur ayam ras, anggur, melon, dan semangka.

"Kami juga mengkhawatirkan tingkat suku bunga yang tinggi," kata Kusmadi. Tingkat suku bunga rata-rata tertimbang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka waktu satu bulan menurut lelang SBI, hari Rabu lalu, telah mencapai 16,16 persen. **(joe)**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 3 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : I / 7-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / NO. KLASS : NEGARA PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA /
361.72

# Kombinasikan Revisi APBN dengan Stabilitas

**Jakarta, Kompas**

Beban defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2001 diarahkan untuk ditanggung warga kelas menengah ke atas. Selama 32 tahun lebih, kalangan *the haves* telah bergelimang kenikmatan. Saatnya mereka menanggung beban defisit. Namun, diingatkan, upaya penutupan defisit dan revisi APBN 2001 tidak cukup. Solusi politik adalah sebuah keharusan dan mutlak karena kisruh politik telah meruñyamkan perekonomian serta melahirkan defisit.

Mantan Menkeu Bambang Sudibyo di Jakarta, Rabu (2/5), juga mengatakan, persoalan defisit tidak bisa diatasi dengan meluncurkan kebijakan fiskal, dengan mengurangi atau merampingkan pengeluaran pemerintah saja.

Defisit juga tidak bisa diatasi lewat kebijakan moneter, dengan mengurangi atau menambah uang beredar atau mengutak-atik suku bunga.

Menurut Bambang, Presiden Abdurrahman Wahid juga harus turut membantu dengan menciptakan stabilitas dan memperbaiki *performance*-nya agar rakyat, investor, dan DPR percaya.

"Jika Presiden dapat mengatasi masalah persatuan, misalnya, sudah menyelesaikan 80 persen dari pekerjaannya. Tugas Presiden itu mewujudkan persatuan, ketertiban, dan kerukunan. Pokus ke sana saja. Soal mengundang investor, memulihkan perekonomian, itu tugas menteri-menterinya," kata Bambang.

Dari sisi fiskal, kata Bambang, memang masih ada peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, yaitu melalui kenaikan cukai rokok.

Dijelaskan, saat ini penerimaan dari cukai rokok sekitar Rp 16 trilyun. Jika cukai dinaikkan sekitar 60 persen, maka akan ada kenaikan penerimaan sebesar 50 persen atau sekitar Rp 8 trilyun dari rokok. "Dugaan saya akan ada tambahan penerimaan dari rokok sekitar Rp 10 trilyun," ujarnya.

Menaikkan cukai rokok akan lebih berarti dibanding dengan menjual obligasi ke pemerintah daerah sebesar Rp 2 trilyun. "Dalam penjualan obligasi ke daerah itu banyak faktor politis yang akan dihadapi. Bisa diartikan, kedaulatan yang sudah diberikan hendak dikurangi, dan itu bisa menimbulkan resistensi dari daerah," demikian Bambang Sudibyo.

## Warga mampu

Menko Perekonomian Rizal Ramli juga mengatakan, beban defisit akan diarahkan ke pundak warga mampu. "Hal itu antara lain bisa dilakukan dengan menaikkan tarif rokok impor, tarif alkohol impor, tarif otomotif dalam bentuk *completely knocked down* (CKD atau bagian-bagian otomotif yang belum dirakit), serta mobil impor jadi (*completely built-up*)."

Semua barang itu, kata Rizal, merupakan barang yang relatif menjadi konsumsi warga mampu.

Dia juga menambahkan, berbagai celah telah mulai dianalisa dan terlihat sebagai potensi penerimaan. "Sebagai contoh kecil, di Jakarta saja, ada 61.000 unit rumah mewah seperti di Pondok Indah, Menteng, Kemang, Kebayoran Baru, Simpruk, Kelapa Gading. Anda tahu, pemilik rumah mewah di kompleks elite itu tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Itu akan dikejar," katanya.

Juga ditemukan, triliunan rupiah deposito warga Indonesia yang tidak jelas asal-usulnya. "Saya kira hal itu bisa dikenakan pajak dengan batasan minimal Rp 50 juta atau Rp 100 juta," katanya.

Menurut Rizal, hal-hal itu kini sedang dikerjakan jajaran Departemen Keuangan, yang memang membidangi hal itu. "Pokoknya ada banyak hal yang belum diungkapkan, tetapi sudah diketahui sebagai sumber penerimaan untuk menutupi defisit. Benang merahnya agak jelas bahwa defisit APBN 2001 sangat wajar untuk ditimpakan ke warga mampu, yang selama 30 tahun lebih menikmati surga dunia di Indonesia ini," ujar Rizal.

Di sisi lain, kata Rizal, sejumlah langkah mengatasi defisit yang mungkin akan membebani rakyat kecil akan diatasi dengan melancarkan semacam program kompensasi. "Misalnya, program pemberian beasiswa diperbanyak, program pengadaan pompanisasi air bersih di daerah minus ditingkatkan," kata Rizal seraya meminta agar upaya untuk menimpakan beban defisit kepada warga mampu tidak menimbulkan perlawanan yang didukung elite politik.

Dia memberikan contoh, yang diminta untuk tidak disebutkan bahwa beberapa waktu lalu, ada upaya pemerintah menaikkan penerimaan, namun mental karena lobi politik.

Sementara itu, menurut Rizal Ramli, setiap kenaikan suku bunga 1 persen akan menaikkan beban defisit Rp 2,5 trilyun, dan setiap kenaikan kurs rupiah sebesar Rp 1.000 juga akan menambah defisit sebesar Rp 8,5 trilyun.

Rizal juga mengatakan, pemerintah merencanakan akan menyampaikan revisi APBN 2001 kepada DPR hari Kamis ini. Namun, revisi APBN itu, katanya, masih harus dibahas dulu di tingkat kabinet untuk dimintai persetujuan. **(har/mon/ely)**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUM'AT / 4 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 4 / 1.5-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : KUSUMA, Hadi W
Subjek : MO. KLASS ANARKISME 1 338.8

# *Di Ambang Kehancuran, "Quo Vadis" Indonesia?*

KALANGAN pengamat politik domestik maupun mancanegara, termasuk Indonesianis terkemuka William Liddle dan Daniel Lev, melontarkan penilaian yang bernada negatif dan cenderung pesimistis tentang situasi politik kontemporer di Indonesia. Penilaian sekaligus peringatan mereka—juga banyak pengamat lainnya—mencerminkan betapa kondisi kehidupan nasional dewasa ini sangat memprihatinkan. Fenomena instabilitas dan kekeruhan sudah mencapai titik "amat mengkhawatirkan".

Setiap insan yang peduli terhadap kondisi bangsa yang terpuruk dan memiliki komitmen kuat terhadap upaya reformasi sejati (bukan reformasi semu yang justru memperparah penderitaan rakyat), niscaya sangat prihatin dengan situasi politik mutakhir, terutama menyangkut gerakan pro-kontra terhadap Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Dalam mengamati segala sepak terjang politik yang berwawasan sempit, ditambah dengan upaya dongkel-mendongkel dan saling menjatuhkan tanpa henti serta semakin bereskalasi di pentas politik Indonesia, kita patut melontarkan pertanyaan kritis ini: untuk apakah semua manuver, gerak, dan aksi tersebut? Ke manakah muara dari perseteruan dan pertikaian politik yang semakin hingar-bingar itu?

Jika para politisi dan kaum elite politik cenderung getol menggunakan slogan "demi kepentingan rakyat", rakyat manakah yang mereka maksudkan? Lebih jauh lagi, apakah memang mereka sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan rakyat, ataukah "kepentingan rakyat" itu tidak lebih dari sesuatu yang sloganistis, bombastis, dan bahkan manipulatif?

Saat ini rakyat Indonesia—terutama mereka yang kecil, lemah dan sesungguhnya paling sengsara akibat krisis yang berkepanjangan—benar-benar merasa miris dan sangat khawatir tentang nasib mereka dan masa depan bangsa-negara ini, yang tampak masih begitu buram. Dalam hati dan benak setiap orang Indonesia yang kritis dan rasional, niscaya terbit pertanyaan ini: Bangsa Indonesia, *quo vadis?*

Secara obyektif harus diakui bahwa Gus Dur memang memiliki kelemahan-kelemahan. Sebagai pribadi, Gus Dur tidak luput dari kerapuhan insani dan manusiawi. Sedangkan dilihat dari aspek profesionalisme, Gus Dur sebagai seorang Presiden/Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dinilai tidak lepas dari tendensi kontroversial serta inkonsistensi.

Namun, kita pun seyogianya bersikap obyektif dan seimbang pula. Apakah Gus Dur patut dan harus memikul seluruh "dosa" dan tanggung jawab moral sendirian terhadap segala keterpurukan sosial, politik, hukum, dan ekonomi, termasuk yang merupakan warisan dosa dan kejelekan era Orde Baru selama 32 tahun? Apakah rapor kinerjanya hanya bernilai "merah" melulu?

Para pendukung Gus Dur menilai, kaum elite politik kelihatannya tidak pernah ikhlas memberikan "kesempatan bernapas" bagi pemerintahan Gus Dur untuk menjalankan tugas dan fungsi sebuah pemerintahan sebagaimana mestinya. Sebagian elite politik dinilai gencar melancarkan kritikan dan manuver yang cenderung destruktif dengan mengatasnamakan "demokrasi dan rakyat", tanpa memberikan saran-saran dan solusi yang positif.

Mungkin karena itu, para pendukung Gus Dur menyimpulkan, kebanyakan kritikan tidak dilandasi semangat nasionalisme, patriotisme sejati, dan bernapaskan semangat demokrasi, tetapi dilakukan semata-mata untuk kepentingan diri dan kelompok. Dengan demikian, kepentingan yang jauh lebih besar yaitu kepentingan bangsa-negara justru terabaikan, bahkan dijadikan tumbal kepentingan politik dan ekonomi mereka!

## Harganya mahal

Ongkos sosialnya diduga tidak kecil, dan harus dipikul oleh seluruh rakyat Indonesia, jika langkah menjatuhkan Gus Dur sampai menimbulkan pergolakan. Berbagai pertanyaan kritis tetap tersisa jika Gus Dur benar-benar dijatuhkan. Apakah jalan demokrasi seperti ini sudah *on the right track* dan sesuai dengan semangat reformasi? Apakah demi tercapainya tujuan politik yang sempit, konstitusi, hukum, dan keadilan serta kepentingan mayoritas rakyat dapat dikorbankan?

Sebagai wacana, seyogianya kita tidak perlu mengesampingkan dulu putusan Pansus Buloggate dan Bruneigate yang secara yudisial masih dapat diperdebatkan. Pertanyaan berikut ini seharusnya perlu dijawab oleh para elite politik serta para pakar hukum tata negara: apakah Gus Dur benar-benar sudah melanggar konstitusi dan GBHN?

Jika jawabannya adalah "ya", Gus Dur otomatis dijatuhkan. Tetapi, tetap menjadi pertanyaan, apa jaminannya bahwa negara ini tidak akan dilanda konflik horizontal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengakibatkan semakin terpuruknya krisis ekonomi-moneter, sosial, hukum dan keamanan, dan dengan sendirinya semakin menyengsarakan mayoritas rakyat Indonesia?

Sekiranya segala kekhawatiran itu tidak terjadi, dan mudah-mudahan memang tidak terjadi, tetap menjadi pertanyaan, jika Megawati Soekarnoputri menjadi presiden sebagai konsekuensi mundur atau diturunkannya Gus Dur sesuai dengan konstitusi, apakah tidak bakal digoyang dan diguncang-guncang sebagaimana dialami Gus Dur? Apakah gonjang-ganjing politik, ekonomi, moneter, dan keamanan menjadi lebih baik ataukah sebaliknya lebih parah?

Lebih jauh lagi muncul pertanyaan, sekiranya Megawati menjadi presiden setelah Gus Dur "dipaksa" mundur, apakah tidak akan dijatukan dalam Sidang Tahunan MPR mendatang? Siapa dan apa yang dapat dijadikan jaminan bahwa tidak akan ada lagi sidang istimewa dengan dalil semakin jeleknya kinerja Presiden (Mbak Mega), semakin terpuruknya kondisi ekonomi, moneter, hukum, sosial, keamanan, dan dalil KKN yang tidak tuntas atau dianggap semakin menjadi-jadi! Demikian juga dengan dalil suara mayoritas, karena suara PDI Perjuangan adalah tetap minoritas (155 suara) dari keseluruhan anggota MPR yang memiliki 700 suara.

## Skenario situasi politik

Dengan memperhatikan situasi yang serba tidak menentu, perlu ditelaah, dicermati, dan diantisipasi tentang beberapa kemungkinan skenario perkembangan politik yang dapat terjadi akibat perkembangan politik aktual dewasa ini.

Skenario pertama: terlaksananya Sidang Istimewa MPR setelah dikeluarkannya memorandum kedua DPR. Melalui sidang istimewa (SI), Gus Dur mungkin saja menghadapi *impeachment* dan terpaksa turun. Jika SI menjadi forum untuk menjatuhkan Gus Dur, bukan tidak mungkin akan terjadi reaksi balik dari para pendukungnya.

Sudah timbul spekulasi, massa NU/Banser dan pendukung fanatik Gus Dur akan melakukan protes keras dan perlawanan untuk membela kehormatan "wali" mereka. Bahkan, ada yang mencemaskan kemungkinan pecahnya konflik fisik secara horizontal, pertumpahan darah, yang bisa saja mulai berlangsung di Jawa Timur, Jawa Tengah, yang bisa saja merembet

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

ke tempat lain, termasuk Jakarta.

Setiap gelombang kekerasan bisa menimbulkan ekses berupa penjarahan, pembakaran, dan perusakan. Bukan mustahil akan terulang lagi tragedi perbuatan terkutuk seperti peristiwa Mei 1998 di mana sekelompok orang yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab menjarah, membakar, memperkosa, dan membunuh dengan memanfaatkan kesempatan *chaos* tersebut. Aksi-aksi destruktif dan tidak berperikemanusiaan ini dapat terjadi lagi di kota-kota yang mengalami gejolak konflik horizontal.

Juga muncul kekhawatiran tentang kemungkinan eksodus besar-besaran etnis keturunan Cina dan para investor asing, jika situasi terus berkembang tak terkendali. Dunia industri dan perdagangan menjadi mandek atau berhenti (ditutup), pelarian modal/uang (*capital flight*) secara besar-besaran ke luar negeri kembali terjadi. Nilai tukar rupiah akan ikut terpuruk, bisa menembus ambang batas Rp 15.000 terhadap dollar AS.

Tak terelakkan pula, angka pengangguran meningkat secara tajam, bisa melebihi 50 juta orang. Harga pangan, obat-obatan, dan suku cadang kendaraan meningkat secara tajam. Aktivitas perekonomian terancam lumpuh total, kondisi keamanan menjadi sangat jelek, rakyat kecil lapar dan menjadi mudah marah (gampang tersulut menjadi amuk massal), keadaan semakin *chaotik* dan tidak terkendali.

Akan terdengar semakin keras pula suara kecaman komunitas internasional tentang kondisi pelanggaran hak asasi. Turis dari mancanegara akan urung berkunjung ke Indonesia, sedangkan angka hunian hotel anjlok, bisa jauh di bawah 20 persen seperti beberapa saat setelah kerusuhan Mei 1998. Kegiatan sektor industri kecil seperti bisnis kerajinan, yang mempekerjakan puluhan juta orang akan sangat terpukul dan niscaya banyak di antaranya yang akan ambruk. Sedangkan angka ekspor Indonesia yang saat ini per bulan lima milyar dollar AS, akan turun drastis dan dibayang-bayangi risiko embargo internasional, khususnya dari Eropa, Australia, dan Amerika.

Skenario kedua: Gus Dur dipaksa turun. Jika tidak terjadi kompromi politik atau tidak mengundurkan diri secara sukarela, Gus Dur mungkin saja dipaksa turun. Suara-suara tentang hal itu semakin kencang pula. Tentu diharapkan, para pendukung Gus Dur bisa menerima kenyataan itu. Tetapi tetap muncul kecemasan tentang kemungkinan kemarahan para pendukung Gus Dur. Kemarahan massa NU/Banser dan pendukung Gus Dur lainnya bisa saja memuncak, yang bisa meriskir konflik horizontal, yang bisa meminta korban, termasuk korban nyawa.

Dalam menghadapi kekacauan itu, presiden baru, yang menggantikan Gus Dur, bisa saja memerintahkan Polri dan TNI menertibkan keadaan chaos tersebut. Aparat keamanan mungkin saja mengambil posisi berhadapan dengan massa brutal. Tindakan represif akan diambil, tetapi belum tentu menghentikan tindakan anarkis yang cepat meluas. Segera dibayangkan pula kemungkinan jatuhnya banyak korban. Keutuhan dan keselamatan negara pun terancam. Negara-bangsa pun berada di ambang kehancuran.

Skenario ketiga: Gus Dur turun, dan Wapres Megawati tidak otomatis menjadi penggantinya sebagai presiden. Muntahan bola liar dalam Sidang Istimewa MPR belum tentu jatuh ke tangan Megawati, meski secara konstitusi, jabatan presiden otomatis jatuh ke tangan Wapres Megawati. Intrik dan manuver politik selama SI bisa saja mendorong tokoh lain, katakan Amien Rais dan Akbar Tandjung, menduduki posisi presiden dan wapres.

Sekiranya skenario ini yang akan terjadi, sudah bisa dibayangkan reaksi "banteng-banteng militan pengikut Megawati." Kekacauan akan terjadi, yang diperkirakan akan berlangsung di seluruh negeri. Gelombang kerusuhan dan aksi kekerasan, yang bisa meminta korban jiwa dan harta benda, bisa terjadi. Keadaan mungkin saja lebih parah dari Peristiwa Mei 1998. Harga-harga melambung tinggi, dan nilai tukar rupiah bisa ambruk ke posisi Rp 20.000 terhadap dollar AS. Anarkisme dan berbagai kejahatan akan muncul di tengah meluasnya kekacauan.

Situasi yang terus memburuk dan tak terkendali bukan tidak mungkin akan menimbulkan pertanyaan tentang makna kehidupan bersama sebagai satu bangsa dan negara. Semangat pemisahan diri akan timbul jika Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak memberikan jaminan keamanan, ketenteraman, dan kehidupan sosial ekonomi yang layak. Ancaman disintegrasi bisa muncul di mana-mana, jika keadaan tidak segera dibereskan. Jumlah personel, peralatan, dan pendanaan TNI yang terbatas tidak akan mampu mengatasi keadaan jika terjadi gejolak disintegrasi di mana-mana. Fenomena balkanisasi bisa saja terjadi, yang bisa membuat Indonesia terpecah-pecah. Sebelum segalanya menjadi runyam, perlu dilakukan tindakan penyelamatan bersama.

## Langkah penyelamatan

Jika situasi sudah amat sulit dikendalikan dan diatasi, maka harus diambil langkah penyelamatan. Penulis berpendapat, dalam situasi keamanan yang sudah sangat gawat dan kritis (jika skenario buruk di atas benar-benar terjadi), TNI harus mengambil peran sejarah untuk mengendalikan keadaan, sehingga negara-bangsa tidak terperosok ke dalam jurang kehancuran.

Selanjutnya perlu dibentuk Dewan/Presidium Nasional Transisional yang terdiri tokoh-tokoh nasional yang impartial (*non-partisan*)—serta tidak perlu diragukan lagi nasionalisme *dan patriotismenya*. Dewan Nasional tersebut dapat menjalankan tugas pemerintahan dan kenegaraan secara temporer hingga terlaksananya pemilu dalam kurun waktu empat-enam bulan, misalnya.

Sementara itu, TNI mendukung dan melindungi sepenuhnya segala kegiatan dan proses yang digulirkan Dewan Nasional. TNI berperan sebagai penjaga konstitusi, pengaman eksistensi bangsa dan negara serta pelindung dan pengayom rakyat. Dengan kata lain, TNI hanya "bermain" pada jalur profesional yang seharusnya, yakni mengamankan proses konstitusional tanpa perlu terlibat secara langsung dalam arena politik praktis.

Sebelum situasi menjadi runyam, sesungguhnya jauh lebih baik jika seluruh warga Indonesia mawas diri, serta sadar tentang bahaya atas manuver politik yang dilakukan para elite politik. Dengan kesadaran tentang bahaya itu, diharapkan orang tidak terperangkap dalam jebakan permainan politik kaum elite yang sangat berbahaya bagi bangsa dan negara. Fenomena balkanisasi atau runtuhnya Imperium Uni Soviet yang terpecah berkeping-keping bukan tidak mungkin dapat terjadi di negeri ini, jika sikap para politisi tetap naif, tidak mau peduli, dan senantiasa asyik memperjuangkan kepentingan dirinya.

Betapa tragis dan jahatnya kita—sekali lagi, terutama para elite politik—jika situasi politik nasional dewasa ini dibiarkan k akhirnya dapat mengarah kepada *bloody chaos*. Betapa beratnya kejahatan kita dan merupakan "dosa yang tak terampuni", jika kita sampai mewariskan kepada para anak-cucu kita hanya puing-puing reruntuhan dari sebuah negara-bangsa yang besar, yang akhirnya hancur-lebur karena ulah p elite politiknya yang lebih mengutamakan *vested interest* dan kepentingan sesaat mereka sendiri!

Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 ✓ 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hari /Bulan/ Tahun : SABTU / SEPTEMBER / 2001
Hlm/Kolom : 13 / 5-7
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : -
Judul ~~Artikel~~/ Berita : IMF Puji RAPBN 2002 ; Target Paris Club III Dan CGI Rp. 34,7 Trilyun
SUBJEK / NO CLASS : UTANG DAN PIUTANG NEGARA (336.3)

# IMF Puji RAPBN 2002

## Target Paris Club III dan CGI Rp 34,7 Trilyun

**Jakarta, Kompas**

Kepala Perwakilan Dana Moneter Internasional (IMF) di Jakarta, David Nellor, memuji Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2002, yang dinilainya memiliki kesimbangan yang tepat antara langkah-langkah untuk menekan defisit anggaran dengan upaya mendorong pemulihan ekonomi.

"Ini anggaran yang hati-hati (*prudent*), yang memperhatikan pentingnya stabilisasi ekonomi dan tujuan sosial. Hal itu sejalan dengan tujuan program reformasi pemerintah dan menunjukkan perimbangan yang cermat antara konsolidasi fiskal dan upaya mempertahankan stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya, sebagaimana dikutip *Reuters*, Jumat (7/9).

Dalam RAPBN 2002, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar lima persen, sementara defisit anggaran direncanakan Rp 43 trilyun atau 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Nellor juga menyambut baik rencana pemerintah untuk menaikkan target penerimaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dari Rp 27 trilyun tahun 2001 menjadi Rp 35,5 trilyun (belum termasuk penerimaan obligasi, yang besarnya Rp 10 trilyun tahun 2001 dan Rp 7,5 trilyun tahun 2002—**Red**).

"Saya rasa salah satu elemen penting dari anggaran, yang menurut saya sudah tepat, adalah adanya keinginan untuk menggunakan sebagian dari hasil penjualan aset BPPN untuk mengurangi utang dalam negeri pemerintah," ujarnya.

### Target CGI dan Paris Club

Sementara itu, pemerintah menargetkan pembiayaan luar negeri untuk RAPBN 2002 senilai total Rp 34,7 trilyun, dalam bentuk pinjaman luar negeri baru melalui Consultative Group on Indonesia (CGI) dan penjadwalan utang melalui Paris Club III.

Menkeu Boediono dalam penjelasan kepada media massa di Jakarta, Kamis malam menyatakan, peranan pembiayaan defisit dari luar negeri pada tahun anggaran 2002 diperkirakan akan sangat terbatas, mengingat t[illegible]nya kekurai[illegible]i-an sumber pembiayaan. Dalam tahun anggaran 2002, jumlah pencairan pinjaman proyek sebagian besar akan berasal dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Jepang.

Sementara, kewajiban pembayaran pokok atas pinjaman yang jatuh tempo tahun 2002 diperkirakan mencapai Rp 41,5 trilyun. Jumlah tersebut telah memperhitungkan penundaan cicilan pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada bulan Januari-Maret 2002, sesuai Paris Club II, sebesar 0,7 milyar dollar.

"Mengacu pada kondisi tersebut, dalam tahun 2002 masih akan diupayakan pinjaman program melalui forum CGI dan penjadwalan kembali pembayaran pokok utang luar negeri melalui forum Paris Club III. Dari upaya tersebut, diharapkan diperoleh pembiayaan luar negeri sebesar Rp 34,7 trilyun. Secara keseluruhan, pembiayaan luar negeri bersih dalam tahun anggaran 2002 diperkirakan Rp 17,5 trilyun atau satu persen dari PDB," kata Boediono.

Mengenai beban bunga utang, Boediono mengatakan, beban bunga utang tahun anggaran 2002 diperkirakan Rp 87 trilyun atau 5,2 persen dari PDB, turun 0,9 persen dibandingkan beban pembayaran bunga utang tahun 2001 yang sebesar 6,1 persen dari PDB. Beban bunga utang Rp 87 trilyun itu terdiri dari bunga utang dalam negeri Rp 59,6 trilyun (68,5 persen) dan bunga utang dalam negeri Rp 27,4 trilyun (31,5 persen).

Untuk mengurangi beban pembayaran bunga utang luar negeri, akan ditempuh antara lain empat cara. Pertama, mengurangi jumlah pinjaman luar negeri baru (*new loan*) secara bertahap. Kedua, mengupayakan pinjaman baru dengan persyaratan seringan mungkin. Ketiga, mempercepat penarikan komitmen pinjaman yang sudah ada. Keempat, membatalkan proyek-proyek pinjaman luar negeri yang dinilai tidak efisien dan efektif. **(tat/har)**

Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hari /Bulan/ Tahun : RABU / SEPTEMBER / 2001
Hlm/Kolom : 13 / 6-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : -
Judul Artikel/ Berita : KUCURAN Pinjaman IMF TAK Angkat Rupiah.
SUBJEK / HO CLASS : UTANG LUAR NEGERI / 336.3

# Kucuran Pinjaman IMF Tak Angkat Rupiah

**Jakarta, Kompas**

Persetujuan Dewan Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengucurkan dana pinjaman 395 juta dollar AS kepada Indonesia, tidak serta merta mengangkat nilai tukar rupiah secara signifikan. Kenyataannya, di pasar *spot* antarbank Jakarta, Selasa (11/9), rupiah justru ditutup melemah tipis 25 poin pada level Rp 9.085/9.095 dibandingkan penutupan pada hari sebelumnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, spekulan lebih menantikan hasil pertemuan Paris Club yang akan membicarakan soal penjadwalan kembali utang Indonesia. Salah seorang *dealer* dari bank swasta mengatakan, meski tipis, depresiasi rupiah itu cukup luar biasa, sebab biasanya berita mengenai pencairan pinjaman dari lembaga donor selalu mendorong penguatan rupiah walau tipis. Rupiah sempat menguat ke level Rp 9.020 per dollar AS dalam hampir dua pertiga masa perdagangan, tetapi akhirnya melemah sampai ke level Rp 9.090 per dollar AS. Melemahnya nilai rupiah itu terutama disebabkan aksi beli dollar AS oleh korporat dan tekanan sentimen regional akibat melemahnya nilai yen Jepang menjadi 121,81 per dollar AS.

Secara umum, mata uang negara-negara Asia melemah terhadap dollar AS seiring dengan melunglainya yen menyusul pernyataan Standard and Poor's tentang penurunan peringkat kredit Jepang. *Dealer* juga mengatakan, Bank Indonesia yang semula tidak campur tangan di pasar uang akhirnya melakukan intervensi. Namun, upaya itu tidak juga berhasil mengangkat nilai rupiah. Selain itu, pelaku pasar masih menunggu kelanjutan pembicaraan utang dengan negara-negara donor yang tergabung dalam Paris Club.

Di pasar saham, kendati belum mampu memicu kegairahan transaksi, dikucurkannya dana bantuan IMF senilai 395 juta dollar AS telah mendorong sejumlah saham unggulan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) ditutup menguat. Masih munculnya tekanan jual terhadap sebagian saham membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) BEJ ditutup hanya menguat tipis 1,876 poin (0,42 persen) ke posisi 445,477 yang juga merupakan level tertinggi harian, setelah sebelumnya sempat menyentuh level terendah 441,766.

Transaksi yang relatif sepi, dengan volume perdagangan hanya mencapai volume 491,3 juta saham senilai Rp 323,9 milyar. Seorang broker mengemukakan, melemahnya indeks saham seluruh bursa di kawasan regional pada perdagangan hari Senin lalu, menyebabkan investor di Bursa Jakarta ragu mengambil posisi, meskipun IMF hari Selasa telah mengucurkan bantuannya bagi Indonesia. **(AFEC/tia)**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 8 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 1 / 3-6
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : UTANG DARI DIUTANG NEGARA / 336.3
1HO klass

# Ada Potensi untuk Atasi Beban Ekonomi

REVISI Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2001 belum juga disampaikan kepada DPR, padahal Indonesia kini sedang berpacu dengan waktu. Rampungnya revisi APBN 2001 adalah salah satu persyaratan bagi Dana Moneter Internasional (IMF) untuk datang kembali, untuk memulai membahas hal yang terkait dengan *letter of intent* (kesepakatan tentang langkah reformasi ekonomi/LoI).

LoI adalah dasar bagi pengucuran bantuan IMF sebesar 400 juta dollar AS yang tertunda sejak Desember 2000. Penundaan itu sendiri sudah menjadi masalah. Namun, lepas dari itu, ada beberapa yang perlu diingatkan tentang defisit yang akan tertuang pada revisi itu.

Tahun 2001 ditandai dengan beban besar. Bunga obligasi untuk rekapitalisasi perbankan serta lainnya bisa melebihi Rp 80 trilyun. Jumlah transfer dana ke daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah juga berjumlah hampir serupa.

Namun, beban masih ada jika kurs rupiah merosot lagi. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, yang juga mencapai kisaran Rp 80 trilyun. BBM dan listrik mengandung komponen impor yang besar sehingga harganya harus mengikuti kurs.

Anggaran pemerintah sensitif terhadap kurs rupiah dan suku bunga. Suku bunga kini minimal harus 15 persen per tahun. Kalau dibuat lebih rendah, modal bisa lari ke luar.

Asumsi kurs dan suku bunga pada APBN 2001 jauh dari kenyataan. Bersama faktor lainnya, defisit akibat kenaikan suku bunga dan melemahnya kurs telah membuat defisit naik dari Rp 52,6 trilyun menjadi sekitar Rp 90 trilyun. Entah bagaimana cara pemerintah menutupi defisi itu.

IMF sudah menekankan tidak akan ada sumber pembiayaan baru dari luar negeri. Bahkan, ada kemungkinan pengurangan bantuan luar negeri dari donor.

Pemerintah sudah menyusun lima jurus menutupi defisit itu. Entah itu bisa dicapai atau tidak. Memang, jika semua subsidi BBM dan listrik secara hipotesis bisa dihapuskan, maka ada penghematan dana besar. Namun demikian, tampaknya beban itu harus ditanggung oleh seluruh lapisan bangsa.

Di zaman Orde Lama, pemerintah bisa membiayai defisit dengan mencetak uang, sekarang tidak karena ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), yang melarang pembiayaan defisit dengan dana dari BI.

Maka, harapan adalah pada lima langkah yang telah diumumkan di berbagai media massa.

Di atas kertas, hal itu bisa dijalankan. Dalam kenyataan, dengan lingkungan atau iklim politik yang tidak mendukung, tampaknya itu menjadi misi yang tidak mungkin.

Pihak yang berpikiran jernih setuju dengan pengurangan subsidi BBM. Namun, pemerintah tidak berani melakukan kenaikan 20 persen saja pada 1 April 2001.

Lalu, jika untuk itu saja tidak berani, bagaimana pemerintah bisa berani melakukannya pada 1 Oktober 2001, dengan menaikkan harga BBM rata-rata yang lebih besar demi pengumpulan dana Rp 5 trilyun.

Pengucuran dana ke daerah, yang digantikan dalam bentuk obligasi, apakah bisa diterima daerah.

Pengumpulan pajak penghasilan, katanya, bisa dinaikkan Rp 10 trilyun dalam sembilan bulan yang akan datang. Bisakah itu? Sepertinya itu bagai mimpi di siang bolong.

Kesimpulannya, lima langkah adalah *mission impossible*.

Dua pekan lalu, Deputi Direktur IMF Urusan Asia Pasifik Anoop Singh pulang ke Washington DC. Dia meninggalkan pesan pada bangsa agar mencamkan realita soal anggaran defisit pemerintah dan bersedia menanggung bebannya dengan konsensus sosial.

Bagaimana menerjemahkan semua itu?

Tidak bisa dihindari untuk meniupkan harapan akan adanya pemerintahan baru.

Andaikata pemerintahan baru itu memilih tim ekonomi yang bisa memupuk kepercayaan para kreditor dan pasar, persoalan pun relatif tetap sama. Sejumlah pil pahit harus tetap ditelan seluruh bangsa.

Namun, bedanya, dengan sebuah tim yang bisa meniupkan kepercayaan di pasar, pengorbanan dari masyarakat luas bisa lebih mudah dimintakan. Pemerintah sekarang sangat mungkin tidak bisa melakukan itu.

Beban utang pemerintah bisa menjadi lebih ringan kalau kurs rupiah menjadi stabil, dan bahkan bisa menguat kembali. Untuk mendapatkan itu adalah dengan adanya pemerintahan yang berhasil meniupkan optimisme baru. Hal itu diharapkan bisa membangkitkan perekonomian.

Kebangkitan ekonomi juga akan membuat harga aset-aset—termasuk di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)—serta aset badan usaha milik negara (BUMN), akan naik.

Pemerintah memang punya utang besar. Namun, jangan lupa, pemerintah juga mempunyai banyak aset dan potensi untuk membawa negara ini keluar dari krisis. ◆

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 15 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 10 / 6-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : PERDAGANGAN INTER-NASIONAL / 382

# Indonesia Sebaiknya Minta Keringanan WTO

**Denpasar, Kompas**

Masih ada jalan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari kehancuran akibat krisis ekonomi dan tekanan internasional. Setelah segala upaya ekonomi dan politik gagal, peluang dengan memanfaatkan celah hukum cukup terbuka. Caranya, dengan meminta keringanan terhadap beberapa ketentuan yang berlaku dalam WTO (*World Trade Organization*) yang sudah ditandatangani Indonesia sejak tahun 1994.

"Syaratnya, Pemerintah Indonesia tak usah malu mengakui negara ini sedang mengalami depresi besar sehingga tak mampu melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam WTO. Jangan gengsi, diakui saja, apalagi dunia internasional sudah tahu betul kesulitan kita. Tinggal sekarang kita harus membuat strategi ekonomi lima tahun ke depan untuk disodorkan ke WTO," kata Prof Sunaryati Hartono ketika membawakan makalah "Celah-celah di dalam Ketentuan WTO Yang Dapat Dimanfaatkan oleh Indonesia," di Denpasar, Sabtu (12/5). Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu berbicara dalam Seminar Nasional yang diadakan Universitas Warmadewa, Denpasar.

Indonesia tahun 1994 menyetujui pembentukan WTO dan kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing WTO* termasuk persetujuan-persetujuan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*).

Dikatakan, sejak tahun 1996 sampai sekarang Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Krisis tersebut telah mengakibatkan defisit anggaran dan tidak seimbangnya neraca pembayaran. Dengan demikian Indonesia termasuk dalam kategori negara yang sedang mengalami kesulitan neraca pembayaran (*balance of payment difficulties*).

"Hal ini sebenarnya sudah diketahui umum (*notoir feit*), sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Apalagi dunia internasional dan IMF sendiri sudah mengakuinya. Sehingga, mestinya sudah lebih dulu Indonesia memanfaatkan kesempatan untuk meminta keringanan dan pengecualian atas kewajiban-kewajibannya," ujar Sunaryati.

Pasal mengenai pengecualian yang cukup penting dalam peraturan GATT adalah Pasal XVIII bagi negara berkembang. Dalam rangka memungkinkan negara-negara berkembang meningkatkan perekonomiannya, GATT membuka kemungkinan bagi negara berkembang untuk menyimpang dari ketentuan.

Fasilitas tersebut hanya diberikan kepada negara-negara yang baru mampu mempunyai tingkat hidup yang masih rendah, serta negara yang baru dalam taraf awal pembangunan. **(sig)**